

---

## DAMPAK KONFLIK ISRAEL PADA HUBUNGAN INTERNASIONAL DI TIMUR

Oleh

Siti Fitriyanti

Mahasiswa S2 Hubungan Internasional Paramadina

E-mail: [ms.siti.fitriyanti@gmail.com](mailto:ms.siti.fitriyanti@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 24-02-2025

Revised: 12-03-2025

Accepted: 27-03-2025

### Keywords:

Konflik Israel-Palestina,  
Hubungan Internasional,  
Diplomasi Timur Tengah,  
Geopolitik Regional, Aliansi  
Diplomatik

**Abstract:** Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menjadi titik balik yang signifikan dalam dinamika geopolitik Timur Tengah, membentuk ulang lanskap hubungan internasional di kawasan yang kompleks dan rapuh ini. Penelitian ini mengeksplorasi dampak mendalam konflik tersebut terhadap struktur diplomatik, aliansi regional, dan ketegangan geopolitik yang terus berkembang di wilayah tersebut. Melalui analisis komprehensif, kajian ini mengungkap bagaimana konflik Israel telah menciptakan perpecahan yang nyata di antara negara-negara Arab, memicu realiansi diplomatik yang tidak terduga dan memperburuk ketegangan antarpemangku kepentingan regional. Polarisasi yang dihasilkan tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga mendorong intervensi kekuatan global seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa dalam upaya mereka untuk mempengaruhi dinamika kawasan. Penelitian ini menemukan bahwa konflik tersebut telah mengakibatkan transformasi signifikan dalam aliansi diplomatik, dengan beberapa negara Arab mulai menormalkan hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham, sementara yang lain tetap berpegang pada solidaritas palestina. Dampak geopolitik ini tercermin dalam pergeseran posisi diplomatik, kompetisi pengaruh regional, dan kompleksitas negosiasi perdamaian yang berkembang. Konflik Israel-Palestina tidak lagi sekadar persoalan bilateral, melainkan telah menjadi episentrum ketegangan internasional yang memengaruhi keseimbangan kekuatan, keamanan regional, dan arsitektur diplomatik Timur Tengah. Implikasinya meluas melampaui batas-batas geografis, membentuk ulang peta aliansi dan konflik di kawasan yang sangat strategis ini

## PENDAHULUAN

Sejarah konflik di Timur Tengah adalah serpihan kisah yang rumit, berdarah, dan tak kunjung usai. Di antara segudang konflik yang menandai kawasan ini, perselisihan antara Israel dan negara-negara di sekitarnya telah menjadi episentrum ketegangan geopolitik yang paling kompleks sepanjang sejarah modern.[1] Konflik ini tidak sekadar persoalan teritori atau kedaulatan, melainkan simpul rumit dari berbagai kepentingan yang saling bertautan, mulai dari dimensi keagamaan, sejarah, politik, hingga kepentingan ekonomi global. Sejak deklarasi berdirinya negara Israel pada 1948, kawasan Timur Tengah seakan tersulut api berkepanjangan. Setiap konflik yang meletus, baik perang enam hari, intifada, hingga konfrontasi berkelanjutan dengan Hamas, bukan sekadar pertarungan bersenjata, melainkan representasi dari ketegangan yang jauh lebih dalam. Konflik ini telah mengubah peta diplomatik, menggeser keseimbangan kekuatan, dan membentuk ulang dinamika hubungan internasional di kawasan yang strategis ini. Persoalannya bukan sekadar tentang pertempuran fisik, melainkan pertarungan narasi, identitas, dan eksistensi. Setiap tembakan yang dilepaskan, setiap bom yang jatuh, setiap resolusi yang dikeluarkan, membawa konsekuensi yang jauh melampaui batas-batas geografis Israel dan tetangganya. Konflik ini telah menciptakan gelombang pengungsi, memutus jalur ekonomi, merenggangkan hubungan antarbangs, dan menjadikan Timur Tengah sebagai panggung drama internasional yang paling kompleks.

Penelitian ini bermaksud membongkar kompleksitas dampak konflik Israel terhadap hubungan internasional di Timur Tengah. Beberapa permasalahan kunci yang mendesak untuk dikaji meliputi Pertama, bagaimana konflik berkepanjangan ini telah mentransformasi peta aliansi dan kepentingan diplomatik di kawasan. Setiap negara memiliki kepentingan tersendiri – ada yang bersikap mendukung, ada yang mengambil jarak, dan ada pula yang secara aktif terlibat. Dinamika ini membentuk konstelasi politik yang dinamis dan rumit. Kedua, dampak ekonomi yang ditimbulkan. Konflik tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga memiliki efek domino terhadap perdagangan internasional, aliran investasi, dan stabilitas ekonomi kawasan. Sanksi, embargo, dan ketegangan politik telah menciptakan iklim ketidakpastian yang merugikan berbagai pihak. Ketiga, dimensi kemanusiaan yang terabaikan. Di balik retorika politik dan strategi militer, terdapat jutaan manusia yang kehilangan rumah, masa depan, dan harapan. Pengungsi, korban perang, dan masyarakat terdampak menjadi korban dari permainan kepentingan yang lebih besar. Keempat, peran aktor internasional dalam dinamika konflik. Bagaimana negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, dan kekuatan Eropa mengambil posisi, memberikan dukungan, atau bahkan melanggengkan konflik melalui berbagai kepentingan geopolitiknya.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekadar upaya akademis untuk memahami sebuah konflik. Lebih dari itu, ia adalah panggilan untuk memahami bagaimana sebuah konflik lokal dapat mentransformasi hubungan internasional, membentuk ulang perspektif diplomatik, dan mempengaruhi masa depan sebuah kawasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang komprehensif, kritis, dan mendalam tentang kompleksitas hubungan internasional di Timur Tengah – sebuah kawasan yang selalu menyimpan misteri, tragedi, dan harapan akan perdamaian.

## **LANDASAN TEORI**

Sebuah penelitian ilmiah tidak pernah berdiri dalam kekosongan konseptual. Ia selalu bersandar pada tradisi pemikiran yang telah teruji, kerangka berpikir yang mendalam, dan perspektif teoritis yang membantu membongkar kompleksitas realitas sosial. Dalam konteks menelaah dampak konflik Israel terhadap hubungan internasional di Timur Tengah, tiga perspektif teoritis akan menjadi pijakan fundamental: teori resolusi konflik, konsep keamanan manusia, dan teori postkolonial.

### **Teori Resolusi Konflik**

Konflik bukanlah sekadar persoalan pertentangan fisik, melainkan pergulatan makna, identitas, dan kepentingan yang sangat kompleks. Teori resolusi konflik mengajak kita untuk melampaui paradigma konfrontasi menuju ruang dialog dan rekonsiliasi.[2] Ia bukan sekadar upaya menghentikan kekerasan, melainkan proses mendalam untuk membangun pemahaman bersama, mengurai akar permasalahan, dan meretas jalan menuju perdamaian yang substansial. Dalam konteks Israel-Palestina, resolusi konflik bukan sekadar persoalan gencatan senjata atau perjanjian diplomatik. Ia adalah proses panjang melibatkan transformasi psikologis, sosial, dan politis. Setiap individu, komunitas, dan negara terlibat dalam konstruksi ulang narasi, membangun empati, dan meruntuhkan pertahanan yang telah dibangun dan dijaga selama puluhan tahun.[3]

Para teoretisi resolusi konflik seperti John Paul Lederach menekankan pentingnya pendekatan yang holistik. Konflik tidak diselesaikan melalui intervensi eksternal belaka, tetapi melalui keterlibatan aktif para pihak yang berkonflik. Mereka harus mampu mendekonstruksi mitos permusuhan, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog yang aman dan setara.

### **Konsep Keamanan Manusia**

Keamanan tradisional selalu dipahami dalam kerangka kedaulatan negara, pertahanan wilayah, dan kekuatan militer. Namun, konsep keamanan manusia menggeser perspektif ini menuju pusat perhatian yang sesungguhnya: martabat dan kehidupan manusia.[4] Ia tidak sekadar berbicara tentang ancaman fisik, melainkan spectrum kerentanan yang jauh lebih luas, mulai dari kemiskinan, diskriminasi, hingga pengasingan struktural. Di kawasan Timur Tengah, keamanan manusia menjadi tantangan fundamental. Konflik Israel bukan sekadar pertarungan ideologis atau teritorial, melainkan realitas sehari-hari yang mengancam eksistensi manusia. Setiap bom yang jatuh, setiap pembatas yang didirikan, setiap pembatasan gerak, mengancam hak-hak dasar manusia untuk hidup, bermartabat, dan mengembangkan potensi diri. Konsep ini mengajak untuk melihat keamanan tidak dari perspektif negara, melainkan dari sudut pandang individu dan komunitas. Bagaimana seorang anak Palestina bisa bermain tanpa ketakutan? Bagaimana seorang remaja Israel bisa tumbuh tanpa bayang-bayang konflik? Inilah pertanyaan fundamental keamanan manusia.

### **Teori Postkolonial**

Postkolonialisme bukan sekadar teori akademis, melainkan cara membaca ulang sejarah dengan kesadaran kritis. Postkolonialisme mengungkap bagaimana kuasa kolonial membentuk ulang identitas, wilayah, dan relasi kekuasaan. Dalam konteks Israel-Palestina, teori ini membuka ruang untuk memahami bagaimana warisan kolonialisme Eropa masih membayangi konflik kontemporer.[5] Theodore Said dalam karyanya "Orientalisme" telah brilian mengurai bagaimana konstruksi "Timur" selalu diproduksi dari perspektif

kekuasaan Barat. Konflik Israel-Palestina tidak bisa dilepaskan dari proyek kolonial penciptaan negara Israel, pembagian wilayah yang sewenang-wenang, dan praktik pengasingan sistematis terhadap penduduk asli. Postkolonialisme mengajak untuk membongkar narasi tunggal, mempertanyakan konstruksi identitas yang diwariskan kekuasaan kolonial, dan membuka ruang bagi suara-suara yang termarginalisasi. Postkolonialisme bukan sekadar kritik, melainkan upaya dekonstruksi sistematis terhadap warisan ketidakadilan historis.[6]

Postkolonialisme lebih dari sekadar kerangka akademis—ia adalah pisau analisis tajam yang membedah lapisan tersembunyi dari sejarah, kekuasaan, dan identitas. Dalam konteks Israel-Palestina, teori ini menghadirkan perspektif radikal untuk memahami kompleksitas konflik yang melampaui sekadar pertentangan territorial. Warisan kolonialisme Eropa terpatri dalam setiap momen konflik Israel-Palestina. Proyek pembentukan negara Israel tidak bisa dipisahkan dari logika ekspansi dan pengkolonian yang dipraktikkan oleh kekuatan Barat. Deklarasi Balfour pada 1917 menjadi momen kritis di mana tanah Palestina secara sepihak "dijanjikan" kepada komunitas Yahudi, mengabaikan sama sekali realitas penduduk asli yang telah berabad-abad mendiami wilayah tersebut.

Theodore Said dalam "Orientalisme" brilian mengungkap bagaimana "Timur" selalu dikonstruksi melalui lensa kekuasaan Barat. [7] Dalam konteks Israel-Palestina, konstruksi identitas menjadi medan pertarungan yang kompleks. Penduduk Palestina tidak sekadar kehilangan wilayah, tetapi juga mengalami proses sistematis pengasingan identitas, di mana narasi mereka dimarginalisasi dan dibungkam. Postkolonialisme menghadirkan pembacaan kritis terhadap:

1. Pembagian Wilayah Sewenang-wenang

Keputusan PBB pada 1947 membagi tanah Palestina tidak lebih dari praktik kolonial lanjutan yang mengabaikan kompleksitas sejarah dan sosial masyarakat setempat.

2. Praktik Pengasingan Sistematis

Pendudukan wilayah, pembangunan pemukiman, dan kontrol militer Israel merepresentasikan kelanjutan logika kolonial dalam mendominasi ruang dan identitas.

3. Narasi Tunggal

Upaya membongkar narasi dominan yang selama ini didominasi perspektif kekuasaan, membuka ruang bagi suara-suara terpinggirkan.

Teori ini bukan sekadar kritik akademis, melainkan:

1. Alat dekonstruksi sistematis terhadap ketidakadilan historis
2. Upaya mengembalikan agensi kepada masyarakat terjajah
3. Membongkar mitos-mitos kolonial yang mengakar

Postkolonialisme mempertanyakan: Siapa yang menulis sejarah? Dari sudut pandang siapakah konflik ini dipahami? Bagaimana kuasa kolonial terus mereproduksi dirinya melalui praktik-praktik kontemporer?

Membaca konflik Israel-Palestina melalui kacamata postkolonial berarti:

1. Menolak narasi linear yang dipaksakan
2. Mengakui kompleksitas sejarah yang tak tunggal

### 3. Membuka ruang dialog yang setara dan bermartabat

Postkolonialisme tidak sekadar teori—ia adalah kesadaran kritis untuk membongkar struktur kekuasaan yang tidak adil, membebaskan ruang bagi narasi yang selama ini dibungkam, dan menciptakan kemungkinan rekonsiliasi yang lebih fundamental.

Ketiga perspektif teoritis ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling berkelindan, membentuk jaring kompleks untuk memahami realitas konflik. Resolusi konflik membuka ruang dialog, keamanan manusia menempatkan martabat individu sebagai pusat perhatian, dan postkolonialisme mengungkap akar-akar historis ketidakadilan. Dengan demikian, landasan teori ini bukan sekadar kerangka konseptual. Ia adalah undangan untuk melihat konflik sebagai realitas multi-dimensi, yang membutuhkan pemahaman mendalam, empati radikal, dan komitmen transformatif menuju perdamaian yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif-analitis yang menggali kompleksitas dampak konflik Israel melalui serangkaian strategi penelitian komprehensif. Fokus utama penelitian akan mengeksplorasi data melalui studi pustaka mendalam yang mengandalkan sumber-sumber akademis, dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, dan publikasi terpercaya yang membahas dinamika konflik di Timur Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis literatur, dokumentasi, dan analisis konten kritis yang memungkinkan peneliti membedah narasi konflik dari perspektif multidimensional.[8] Proses analisis data akan menggunakan metode interpretasi dialektis, di mana setiap data dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks sejarah, political economic, dan dinamika sosial yang melingkupi konflik. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas temuan, dengan mengkombinasikan sumber informasi dari berbagai sudut pandang – mulai dari dokumen diplomatik hingga kajian literatur akademis terkini. Pendekatan komparatif turut digunakan untuk membandingkan pola konflik Israel dengan konflik serupa di kawasan, guna menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam tentang kompleksitas hubungan internasional di Timur Tengah. Penelitian ini tidak sekadar mencatat fakta, melainkan berupaya membongkar lapisan tersembunyi dari dinamika konflik, memberi pemaknaan kritis, dan menghadirkan perspektif yang mampu menembus batas-batas naratif konvensional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Perjalanan konflik Israel di Timur Tengah adalah kisah panjang yang merentang jauh sebelum deklarasi berdirinya negara Israel pada 1948, bermula dari kompleksitas sejarah kolonial dan pergolakan identitas yang rumit. Akar konflik sesungguhnya telah tertanam jauh sebelum Perang Dunia I, ketika kawasan Palestina masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman.[3] Kedatangan gelombang imigran Yahudi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mulai mengubah lanskap demografis wilayah ini, menciptakan ketegangan fundamental antara penduduk Arab setempat dan komunitas pendatang.[1] Momen kritis terjadi pada 1917 dengan Deklarasi Balfour, di mana Inggris secara sepihak menjanjikan tanah Palestina sebagai "tanah air nasional" bagi Jewish people, suatu keputusan yang mengabaikan sama sekali hak-hak penduduk Arab yang telah berabad-abad mendiami

wilayah tersebut. Perang Dunia II dan Holocaust di Eropa membawa gelombang baru imigrasi Yahudi yang massif, mempertajam konflik. Pembagian wilayah oleh PBB pada 1947 yang membagi tanah Palestina menjadi dua negara – Israel dan Arab – justru memicu pertempuran berdarah.[9] Perang 1948 yang menyusulnya tidak sekadar konflik bersenjata, melainkan titik balik sejarah yang mengubah peta geopolitik Timur Tengah selamanya. Kekalahan negara-negara Arab dan eksodus besar-besaran penduduk Palestina (nakba) menciptakan luka sejarah yang tak kunjung sembuh.

Perang enam hari pada 1967 menjadi momen transformatif lain, di mana Israel mengambil alih wilayah-wilayah strategis seperti Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai.[10] Pendudukan ini bukan sekadar perluasan teritorial, melainkan rekonfigurasi fundamental hubungan kekuasaan di kawasan. Setiap kilometer tanah yang dikuasai membawa konsekuensi diplomatik, sosial, dan psikologis yang mendalam. Intifada – perlawanan rakyat Palestina – pada akhir 1980-an dan 1990-an mengubah dinamika konflik.[7] Dari perlawanan bersenjata, konflik bergeser ke arena diplomasi dan perang narasi internasional. Kesepakatan Oslo pada 1993 sempat memberi harapan perdamaian, namun pada praktiknya justru semakin mempertegas ketidaksetaraan. Pembangunan pemukiman Israel di wilayah pendudukan, pembatas ketat, dan kontrol militer yang represif terus menimbulkan ketegangan. Dampak politik regional dari konflik ini sungguh fundamental. Negara-negara Timur Tengah terpolarisasi ke dalam kelompok yang pro-Israel, anti-Israel, dan mereka yang berada di antara kedua kutub tersebut. Mesir, setelah perjanjian Camp David 1979, menjadi pionir normalisasi hubungan. Yordania menyusul pada 1994. Namun mayoritas negara Arab masih menolak pengakuan resmi, membentuk blok solidaritas dengan Palestina.[3]

Aliansi politik kawasan pun mengalami transformasi konstan. Arab Saudi, yang tradisional anti-Israel, perlahan mengubah sikap sejalan dengan kepentingan geopolitik melawan Iran. Kesepakatan Abraham Accord yang dimediasi Amerika Serikat pada 2020 membuka hubungan diplomatik UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan dengan Israel, memecah solidaritas Arab tradisional.[1] Ini bukan sekadar pergeseran diplomatik, melainkan rekonfigurasi ulang kepentingan strategis kawasan. Kekuatan diplomatik pun bergeser secara signifikan. Amerika Serikat tetap menjadi pendukung utama Israel, dengan bantuan militer dan diplomatik yang konsisten. Rusia dan China mulai mengambil posisi lebih aktif, tidak sekadar sebagai pemain eksternal, tetapi aktor yang memiliki kepentingan strategis. Iran menjadi kekuatan tandingan utama, mendukung kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas dan Hizbullah. Kerja sama regional pun terpengaruh secara mendalam. Potensi ekonomi, pertukaran teknologi, dan kerja sama keamanan yang seharusnya bisa dikembangkan justru terhambat oleh konflik berkepanjangan. Setiap negara dipaksa untuk memilih posisi, mengunci diri dalam lingkaran ketegangan yang destruktif. Kawasan Timur Tengah kehilangan momentum untuk membangun ekosistem kerja sama yang produktif. [7]Kompleksitas ini menunjukkan bahwa konflik Israel bukan sekadar persoalan teritorial, melainkan simpul rumit dari pergulatan identitas, sejarah, dan kepentingan geopolitik. Setiap dekade membawa transformasi baru, setiap konflik kecil berpotensi memantik gelombang ketegangan yang lebih besar. Perdamaian bukan sekadar tentang gencatan senjata, melainkan rekonsiliasi mendalam atas luka sejarah yang menganga.



## Pembahasan

Upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina telah menjadi labirin kompleks yang melibatkan sejumlah mediator internasional, dengan Amerika Serikat menduduki posisi paling sentral dalam serangkaian negosiasi yang hampir selalu berakhir di titik buntu. Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan 1995 merupakan tonggak paling signifikan dalam sejarah diplomasi kawasan, yang sempat menimbulkan harapan besar akan perdamaian melalui konsep "two-state solution", namun nyatanya hanya menjadi catatan sejarah yang rapuh. Perjanjian Camp David pada tahun 2000 di bawah mediasi presiden Bill Clinton menandakan puncak upaya diplomatik yang paling ambisius, tetapi berakhir dengan kegagalan total, memperlihatkan betapa rumitnya mencapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak yang memiliki sejarah konflik berkepanjangan.[7] Tantangan utama dalam mencapai perdamaian terletak pada isu-isu fundamental yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan, seperti status Yerusalem, hak pengungsi Palestina, dan keberadaan pemukiman Israel di wilayah pendudukan. Inisiatif diplomasi alternatif, termasuk pendekatan Track II yang melibatkan akademisi, aktivis sipil, dan tokoh masyarakat, telah mencoba menghasilkan terobosan dengan fokus pada dialog antarmanusia dan pertukaran perspektif, namun hasilnya masih jauh dari resolusi konflik yang komprehensif.[11] Organisasi internasional seperti PBB berkali-kali mencoba menjembatani perbedaan, namun selalu terkendala oleh veto Amerika Serikat dan kepentingan geopolitik yang kompleks. Setiap upaya mediasi selalu tersandung pada akar permasalahan yang sangat dalam: ketidakpercayaan historis, trauma kolektif, dan ketegangan ideologis yang telah mengakar selama puluhan tahun. Ironisnya, semakin banyak upaya diplomasi yang dilakukan, semakin nyata pula keterbatasan pendekatan diplomatik konvensional dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan ini, yang tampaknya lebih mirip dengan lingkaran setan diplomasi yang tidak pernah berujung.[11]

Lanskap diplomasi dalam konflik Israel-Palestina merupakan narasi kompleks yang menggambarkan serangkaian upaya perdamaian yang berkelok-kelok, di mana setiap mediasi internasional turut membentuk peta dinamika geopolitik Timur Tengah dengan cara yang sangat rumit dan sarat akan kepentingan tersembunyi. Amerika Serikat, sebagai mediator utama, telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam setiap tahapan negosiasi, mulai dari Perjanjian Camp David pada tahun 1978 yang menghasilkan perdamaian antara Israel dan Mesir, hingga Kesepakatan Oslo pada 1993-1995 yang pernah dianggap sebagai tonggak paling revolusioner dalam upaya perdamaian.[12] Perjanjian-perjanjian historis ini tidak hanya sekadar dokumen diplomatik, melainkan representasi kompleks dari pertarungan kepentingan, di mana setiap koma dan pasal mewakili tarik-menarik politik yang melibatkan kepentingan nasional, keamanan regional, dan aspirasi kemanusiaan yang sangat mendalam. Tantangan utama dalam mencapai perdamaian berkelanjutan terletak pada serangkaian isu fundamental yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan: status definitif Yerusalem yang disengketakan, hak pengungsi Palestina, keberadaan pemukiman Israel di wilayah pendudukan, serta ketegangan keamanan yang terus-menerus menghantui hubungan kedua belah pihak. Inisiatif diplomasi alternatif, seperti pendekatan Track II yang melibatkan akademisi, aktivis sipil, dan tokoh masyarakat lintas batas, telah mencoba menghasilkan terobosan dengan fokus pada dialog antarmanusia, pertukaran perspektif, dan rekonsiliasi psikologis, namun nyatanya masih

jauh dari resolusi konflik yang komprehensif. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa berkali-kali terjebak dalam kompleksitas diplomasi, dengan Dewan [13]

Keamanan PBB seringkali lumpuh akibat veto Amerika Serikat yang konsisten melindungi kepentingan Israel, sementara negara-negara Eropa dan negara Arab terus berupaya menghasilkan formula perdamaian yang dapat diterima kedua belah pihak. Peran mediator internasional seperti Uni Eropa, Liga Arab, dan berbagai negara individual telah mencoba berbagai pendekatan, mulai dari tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, hingga insentif kerja sama bilateral, namun selalu terkendala oleh akar permasalahan yang sangat dalam: ketidakpercayaan historis, trauma kolektif, dan polarisasi ideologis yang telah mengakar selama puluhan tahun. Setiap babak negosiasi seperti Kesepakatan Camp David pada tahun 2000, Konferensi Annapolis pada 2007, hingga berbagai inisiatif perdamaian terakhir, selalu berakhir dengan kegagalan yang memperlihatkan betapa sulitnya mencapai titik temu dalam konflik yang seolah tanpa ujung ini.[12] Ironisnya, semakin banyak upaya diplomasi yang dilakukan, semakin nyata pula keterbatasan pendekatan konvensional dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan, yang tampaknya lebih mirip dengan lingkaran setan diplomasi yang terus berputar tanpa harapan penyelesaian. Proyeksi masa depan konflik ini menunjukkan kompleksitas yang semakin mendalam, di mana setiap negosiasi bukan sekadar upaya perdamaian, melainkan pertarungan naratif sejarah, identitas, dan eksistensi yang sangat fundamental.

## **KESIMPULAN**

Konflik Israel-Palestina telah mengukir narasi geopolitik yang kompleks dan transformatif di kawasan Timur Tengah, melampaui sekadar persoalan teritorial menjadi simpang siur dinamika hubungan internasional yang rumit. Sejak deklarasi berdirinya negara Israel pada 1948, konflik ini tidak sekadar membentuk ulang peta wilayah, melainkan secara fundamental mengubah arsitektur diplomatik dan aliansi regional yang telah mapan selama beberapa dekade. Dampak paling signifikan terlihat dalam polarisasi diplomatik yang tajam. Negara-negara Timur Tengah terpecah menjadi konfigurasi Politik yang dinamis - mulai dari negara-negara yang secara terbuka menormalkan hubungan dengan Israel melalui Kesepakatan Abraham, hingga mereka yang teguh mempertahankan solidaritas dengan Palestina. Mesir dan Yordania menjadi pionir normalisasi hubungan sejak akhir 1970-an dan 1990-an, sementara negara-negara seperti UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan kemudian mengikuti melalui kesepakatan diplomatik baru yang diprakarsai Amerika Serikat pada 2020. Kompleksitas konflik ini telah menghadirkan panggung geopolitik yang sangat dinamis, di mana kekuatan global seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktor aktif yang memiliki kepentingan strategis. Peran Amerika Serikat sebagai pendukung utama Israel, serta posisi Iran sebagai kekuatan tandingan yang mendukung kelompok perlawanan, semakin memperumit lanskap diplomatik kawasan. Konflik ini telah menghambat potensi kerja sama regional yang sangat besar. Pertukaran ekonomi, teknologi, dan inisiatif keamanan yang seharusnya dapat dikembangkan justru tercekam oleh ketegangan berkepanjangan. Setiap negara dipaksa untuk memilih posisi, yang pada gilirannya mengunci mereka dalam lingkaran ketegangan destruktif yang merugikan seluruh kawasan. Upaya diplomatik yang dilakukan selama puluhan tahun - dari Perjanjian Oslo hingga berbagai inisiatif perdamaian



internasional - telah memperlihatkan betapa sulitnya mencapai resolusi komprehensif. Isu-isu fundamental seperti status Yerusalem, hak pengungsi Palestina, dan keberadaan pemukiman Israel di wilayah pendudukan tetap menjadi batu sandungan utama dalam setiap negosiasi.

Kesimpulannya, konflik Israel telah mengubah Timur Tengah menjadi kawasan dengan dinamika hubungan internasional yang sangat kompleks dan tidak linear. Ia bukan sekadar konflik territorial, melainkan simpul rumit pergulatan identitas, sejarah, dan kepentingan geopolitik yang terus berevolusi. Setiap dekade membawa transformasi baru, dan setiap konflik kecil berpotensi memantik gelombang ketegangan yang lebih besar, membuat perdamaian bukan sekadar tentang gencatan senjata, melainkan rekonsiliasi mendalam atas luka sejarah yang menganga.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] B. G. M. Billah, Moh. J. M. Hakim, and U. Bahrudin, "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel dan Dampaknya Terhadap Palestina," *Jurnal ICMES*, vol. 7, no. 1, pp. 62–81, Jun. 2023, doi: 10.35748/jurnalicmes.v7i1.147.
- [2] F. Ibrahim and A. Putrijanti, "Penerapan Hukum Humaniter oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998," *UNES Law Review*, vol. 6, no. 4, 2024.
- [3] A. U. Khair, "Strategi Diplomasi Qatar dalam Kesepakatan Pertukaran Tawanan antara Hamas-Israel pada November 2023," *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, vol. 6, no. 2, pp. 103–114, 2023, doi: 10.24198/padjirv6i2.56646.
- [4] Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional*. Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022.
- [5] B. Mauna, *Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam era dinamika Global)*. : PT.Alumni. Bandung: T Alumni, 2013.
- [6] B. Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- [7] I. Setiawan, "Eskalasi Konflik Palestine-Israel di Tahun 2023: Perspektif Kebijakan Luar Negeri Indonesia," *JHI*, vol. 17, no. 1, pp. 248–263, Jun. 2024, doi: 10.20473/jhi.v17i1.52392.
- [8] D. S. Azhari, Z. Afif, M. Kustati, N. Sepriyanti, and U. M. Y. Batusangkar, "Penelitian Mixed Method Research Untuk Disertasi," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 2, pp. 8010–8025, 2023.
- [9] M. Ra'afi Nur Azhami, P. Adisha Nur Syafira, and M. Zaqi Muttaqin, "Konflik Israel-Palestina: Peran PBB dan Pengaruh Pengakuan Palestina sebagai Negara Pengamat," *PJIIB*, vol. 24, no. 2, p. 257, Sep. 2024, doi: 10.24843/PJIIB.2024.v24.i02.p18.
- [10] E. Efendi and M. H. Siregar, "Framing Media Republika Dan Kompas Terhadap Konflik Palestina Dan Israel," *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, vol. 2, no. 2, 2024.
- [11] F. N. Hakiem, L. D. M. Putri, and N. A. Gustianti, "Dampak Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Dan Negara-Negara Arab Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Timur Tengah," *JDG*, vol. 8, no. 2, pp. 305–318, Dec. 2023, doi: 10.36859/jdg.v8i2.1883.
- [12] S. Khairani, D. Aulia, I. Anggiantoro, and M. Batubara, "Dampak Konflik Palestina-Israel

Terhadap Perekonomian Dunia," *Jurnal Studi Multidisipliner*, vol. 8, no. 6, 2024.

- [13] S. B. Mudore, "Arah Perdamaian Konflik Palestina-Israel Pascaserangan 7 OKTOBER 2023," *Jurnal GeoCivic*, vol. 7, no. 2, 2024.